

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang kesehatan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Aspek kesehatan merupakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani yang berfungsi untuk pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) serta penggerak modal pembangunan nasional (Sabilla & Kriswibowo, 2021).

Dengan memperhatikan aspek kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan pola hidup sehat agar tercipta lingkungan kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang optimum sehingga memiliki pengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula (Fitriany et al., 2016). Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa jika kesehatan lingkungan yang berkualitas telah diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta tingkat kesehatan yang optimal.

Sebuah tolak ukur negara maju dan berkembang bisa diketahui dari bagaimana suatu negara tersebut mengutamakan faktor kesehatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Dalam hal

ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memiliki peran yaitu berupaya memfokuskan kesehatan masyarakat dengan kesehatan yang merata, adil dan berkualitas (Kemenkes RI, 2020). Salah satu permasalahan di bidang kesehatan adalah *stunting* (Rahayu et al., 2018).

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dan bertransisi menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, pencapaian di bidang gizi masih tertinggal dari aspek kesehatan lain yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Jutaan anak dan remaja Indonesia masih menderita angka *stunting* dan *wasting* yang tinggi, serta mengalami ‘beban ganda’ akibat malnutrisi, baik dalam bentuk kurang gizi maupun lebih gizi (Unicef, 2019). Hal ini juga dipertegas oleh UNICEF, WHO, dan *World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates* (2018) yang mengemukakan masalah *stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang.

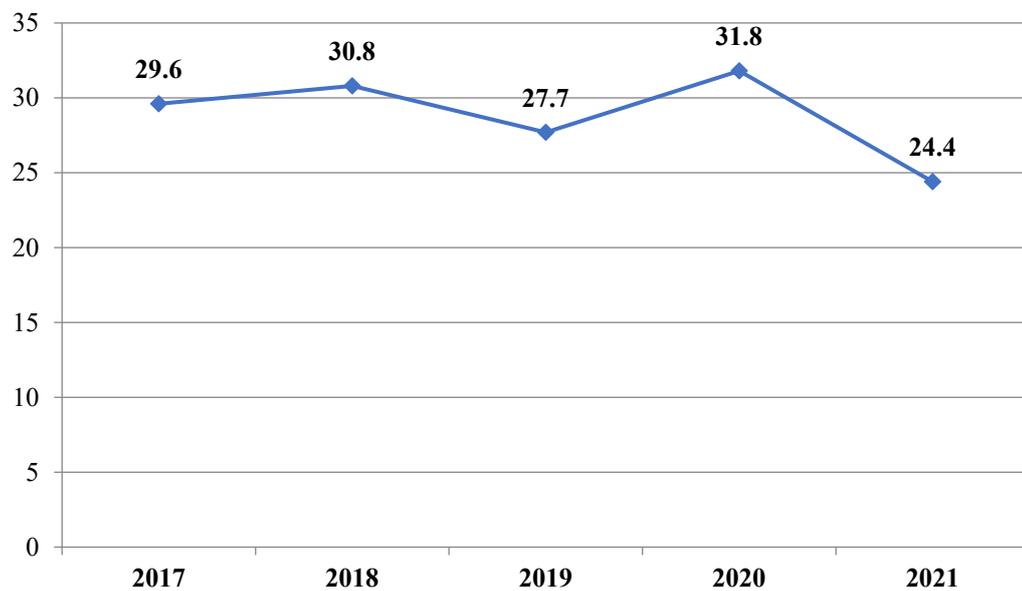
Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Unicef, 2013 dalam Lia, 2022). Beberapa studi menunjukkan risiko yang diakibatkan *stunting* yaitu penurunan prestasi akademik (Picauly & Toy, 2013), meningkatkan risiko obesitas (Timaecus, 2012; Djamin & Susanti, 2021), lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dan peningkatan risiko penyakit degeneratif (Crookston et al., 2013 dalam Mustika & Syamsul, 2015). Artinya, kondisi *stunting* berdampak pada permasalahan kesehatan yang memperlihatkan masalah nyata dan serius (Tanoto Foundation, 2020).

Menurut Laili & Andriani (2019), *stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dipertegas oleh Vinci et al., (2022) bahwa *stunting* merupakan kondisi kekurangan gizi kronis sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK) seorang anak masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, menduduki peringkat kedua di dunia.

Mengacu pada “*The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition*” dan “*The Underlying Drivers of Malnutrition*” yang ditulis oleh *International Food Policy Research Institute* (2016), dan “Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia” oleh Kementerian PPN/Bappenas (2018), diketahui bahwa penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi yaitu: 1) faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, 2) lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, 3) akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, dan 4) kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu serta anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Stunting perlu dilihat sebagai persoalan yang penting untuk diatasi karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hal ini pun sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi PBB 1989 tentang Hak Anak yang mengandung 4 (empat) prinsip penting, yaitu non-

diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Mengatasi *stunting*, berarti upaya menjalankan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Teja, 2020). Selain itu juga, dalam rangka menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit.



Gambar 1.1. Prevalensi *Stunting* Indonesia Tahun 2021

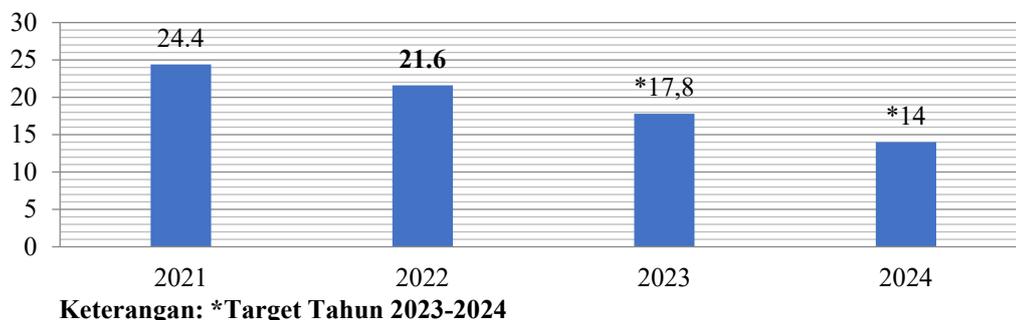
Sumber: *Asian Development Bank* (ADB) dalam *Databoks* (2021), diolah oleh Peneliti Februari 2023

Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi *stunting* menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Berdasarkan data dari ADB dikutip *Databoks* (2021), diketahui bahwa pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki angka tertinggi prevalensi penderita *stunting* atau masih di atas 20% yaitu 24,4%. Angka tersebut mengindikasikan belum mencapai target WHO yaitu di bawah 20%.

Merespon hal tersebut, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini menjadi bagian wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Lebih lanjut, melansir website resmi bappenas.go.id, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan:

“Perpres ini juga memperkuat penerapan Stranas Percepatan Penurunan *Stunting* 2018-2024 yang bertujuan menurunkan prevalensi *stunting*, menjamin pemenuhan asupan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.”

(<https://www.bappenas.go.id/id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaiki-gizi-indonesia-20Pyg> diakses pada Senin, 27 Februari 2023)



Gambar 1.2. Hasil Survei *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 oleh SSGI
Sumber: Sehatnegeriku.kemkes.go.id (2023)

Adanya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* membuahkan hasil positif di mana Kemenkes RI mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghasilkan prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di

2022. Secara keseluruhan, jumlah yang paling banyak penurunan angka *stunting* adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten (Sehatnegeriku.kemkes.go.id, 2023).

Percepatan penurunan *stunting* akan berhasil apabila dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian / lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten / kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Hal ini mengingat percepatan penurunan *stunting* juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030 mendatang. Alhasil, penurunan angka *stunting* telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia yakni pada tahun 2021 mencapai 23,5% yang kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 4,3 persen menjadi 19,4% (Databoks, 2023). Capaian tersebut melebihi target prevalensi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yaitu 20,13%. Meskipun demikian, Jawa Timur mencatat terdapat 20 kabupaten / kota dengan prevalensi *stunting* di atas 20%. Sedangkan 18 kabupaten / kota lainnya di bawa angka 20% (Hakim, 2023).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Ashta Triyono mengatakan kunci strategi dalam penanganan *stunting* adalah upaya untuk memperbaiki pola asuh dari tingkat remaja putri, pra nikah, menikah, hamil hingga melahirkan. Hal ini dibuktikan dalam laman Beritasatu.com (2023) sebagai berikut:

“Berdasarkan tahapan itu, proses pendekatan pola asuh dapat di maksimalkan, sehingga tumbuh kembang anak dapat terjaga kesehatannya dan *stunting* dapat dihindari, Dinkes Jawa Timur gencar melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat yang ada di Jatim untuk menekan angka *stunting*. Kita terus berkolaborasi dengan berbagai OPD. Apalagi, data dari Kemenkes angka *stunting* di Jatim mengalami penurunan. Target yang kita lakukan supaya angka *stunting* di Jatim turun hingga 14 persen di tahun 2024.”
(<https://www.beritasatu.com/news/1022913/jatim-targetkan-angka-stunting-turun-14-persen-di-2024> diakses pada Selasa, 28 Februari 2023)

Dibalik keberhasilan pencapaian di atas, dikutip dari laman berita JawaPos.com (2023) diketahui masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam penanganan *stunting* di Jawa Timur, diantaranya yaitu menekan angka prevelensi kabupaten / kota yang masih di atas 30 persen dan mereleasasikan target prevalensi pada tahun 2024 di bawah 14 persen. Selain itu, juga tidak kalah penting lainnya yakni mengurangi angka kelahiran pada ibu muda. Sebab, fenomena tersebut masih banyak terjadi di Jawa Timur. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki kasus *stunting* yang cukup tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo menjadi lokus *stunting* kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Pemekaran Kabupaten/Kota intervensi fokus lokasi terpadu pengurangan *stunting* 2022. Hal ini dikarenakan *stunting* masih menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan di Kabupaten Sidoarjo. Data dari Dinkes Jawa Timur yang dikutip oleh Harianbhirawa.co.id (2022) bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo memiliki angka kasus *stunting* di Jawa Timur dengan prevalensi 24,8 persen berdasarkan hasil yang dirilis oleh SSGI. Kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 14,8 persen. Hasil

tersebut memposisikan Kabupaten Sidoarjo berada di tujuh terbaik se-Jawa Timur.

Akan tetapi hasil tersebut masih mendapat catatan kritis dari Bupati Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Mudhlor mengatakan penyebab utama kasus *stunting* terhadap anak di wilayahnya bukan karena faktor kurangnya gizi. Lebih lanjut, kasus *stunting* atau masalah pertumbuhan pada anak di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena mengkonsumsi air tanah atau air sumur yang tidak layak mengandung logam berat timbal (Pb) lebih dari standar ukuran yang diperbolehkan. Hal tersebut dijelaskan dalam laman berita Liputan6.com (2022) sebagai berikut:

“Perkembangan kasus *stunting* di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah menurun dari 28 persen pada tahun 2018 menjadi 14 persen pada tahun 2022. Menurutnya, angka kasus *stunting* 14 persen tersebut berdasarkan hitungan anak antara usia 0-59 bulan atau anak di bawah 5 tahun yang jumlahnya sekitar 34 ribu orang. Kasus *stunting* di Sidoarjo yang disebabkan gizi buruk jumlahnya lebih kecil dibanding mengkonsumsi air tanah yang mengandung timbal. Ia mengatakan dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dijelaskan kandungan timbal (Pb) dalam air yang aman untuk dikonsumsi sekitar 0,1 mg per liter. Catatan kami, bahwa *stunting* di Sidoarjo itu bukan karena gizinya, tapi edukasi di masyarakat yang masih mengkonsumsi air tanah.”

(<https://www.liputan6.com/jatim/read/4907832/bupati-ahmad-mudhlor-ungkap-penyebab-kasus-stunting-di-sidoarjo> diakses pada Senin, 27 Februari 2023)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo telah banyak dilakukan untuk mengatasi *stunting* di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita, penyuluhan tentang ASI Eksklusif dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta sejumlah inovasi dalam bentuk aplikasi (*online*) seperti SiCantik, Lestari dan BKB Emas (Penghapusan Masalah Anak *Stunting*). Namun, intervensi tersebut belum cukup untuk mengatasi *stunting*

karena membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut berperan menangani masalah *stunting* (Putri & Sukmana, 2022).

Oleh sebab itu, Pemkab Sidoarjo terus mengejar penurunan *stunting* salah satunya dengan melakukan rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Sidoarjo dengan pendampingan dari BKKBN Jawa Timur. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi program percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan OPD maupun lintas sektor. Beberapa kegiatan diantaranya dari pembentukan TPPS tingkat kabupaten sampai tingkat desa maupun Rembug *Stunting* hingga audit *stunting* (Sidoarjo.kab.go.id, 2022). Pelaporan percepatan penurunan *stunting* dilakukan TPPS Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah (Jatim.antaranews.com, 2022).

Pemkab Sidoarjo juga memprioritaskan penanganan kasus *stunting* di beberapa desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Terhitung ada 8 Kecamatan yang didalamnya meliputi 29 desa yang menjadi prioritas untuk diintervensi hingga sampai tahun 2023 meliputi 3 desa di Kecamatan Waru, 3 desa di Kecamatan Krian, 5 desa di Kecamatan Gedangan, 4 desa di Kecamatan Wonoayu, 4 (empat) desa di Kecamatan Buduran, 1 desa di Kecamatan Sidoarjo Kota, 1 desa di Tulangan, 1 desa di Kecamatan Porong, 1 desa di Krembung dan 6 desa di Kecamatan Candi (Surabaya.tribunnews.com, 2022).

Lebih lanjut, prioritas penanganan *stunting* ini dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sidoarjo menuju zero *stunting*. Program tersebut juga sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Secara implisit, kegiatan ini juga tersirat dalam RPJMD Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan SDG's yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di semua usia. Strategi konvergensi tersebut memadukan dan mengkolaborasikan berbagai rencana kegiatan dari berbagai OPD dan *stakeholder* (Beritajatim.com, 2022).

Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai perkembangan kasus *stunting* selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1. Hasil Rekap *Stunting* Tahun 2021-2022 di Kabupaten Sidoarjo

No.	Puskesmas	Data <i>Stunting</i> 2021			Data <i>Stunting</i> 2022		
		Balita yang diukur TB	Jumlah	%	Balita yang diukur TB	Jumlah	%
1.	Tarik	2055	137	6,7	1.320	122	4,9
2.	Prambon	3595	189	5,3	1.049	351	10,0
3.	Krembung	2697	186	6,9	3.376	281	8,5
4.	Porong	2347	179	16,2	1.609	76	5,4
5.	Jabon	2214	359	16,2	2.150	258	15,6
6.	Tanggulangin	3877	130	3,4	2.848	77	1,8
7.	Candi	6278	747	11,5	6.368	352	7,1
8.	Tulangan	4256	449	20,9	3.770	292	12,7
9.	Wonoayu	3960	284	7,2	3.798	202	4,9
10.	Sukodono	7772	204	2,6	6.222	132	2,1
11.	Sidoarjo	9674	661	25,1	5.372	455	16,1
12.	Buduran	3884	370	9,5	3.674	321	7,7
13.	Sedati	4671	172	3,7	2.989	301	6,8
14.	Waru	5126	861	32,4	2.865	323	11,7
15.	Gedangan	4888	749	29,9	4.015	405	14,8
16.	Taman	7387	284	7,5	7.171	535	13,2
17.	Krian	7416	81	1,9	7.910	297	8,1
18.	Balongsendo	2343	337	14,4	1.526	92	4,0
Jumlah		84440	6379	7,6	68.032	4.872	5,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa dari 18 kecamatan di atas, pada tahun 2021 angka *stunting* di Kecamatan Gedangan menjadi wilayah tertinggi kedua setelah Kecamatan Waru dengan

persentase kasus sebanyak 749 kasus *stunting* atau 29,9 persen. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan berada di posisi tertinggi ketiga setelah Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Jabon dengan persentase kasus sebanyak 405 kasus *stunting* atau 14,8 persen dibanding kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2023).

Keberhasilan tersebut, membuat Pemkab Sidoarjo menjadikan Kecamatan Gedangan sebagai lokasi percontohan audit *stunting* bersama dengan Kecamatan Buduran dan Kecamatan Candi. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia yang dikutip oleh laman berita Voi.id (2022) bahwa tiga kecamatan tersebut masuk dalam zona risiko tinggi.

“Audit *stunting* ini merupakan instruksi dari pusat yang diturunkan ke provinsi. Provinsi memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk melakukan audit terkait *stunting* ini berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo masih 7,7 persen di bawah standar nasional. Harapannya Sidoarjo bisa zero *syunting*. Dari 10 desa lokus yang ditetapkan kalau kita kerucutkan lagi, itu berada di Kecamatan Buduran, Candi dan Gedangan. Ada 3 desa lokus yang dijadikan sebagai *pilot project* kegiatan audit *stunting*.” (<https://voi.id/berita/196002/pemkab-sidoarjo-jadikan-3-kecamatan-percontohan-audit-stunting> diakses pada Senin, 27 Februari 2023)

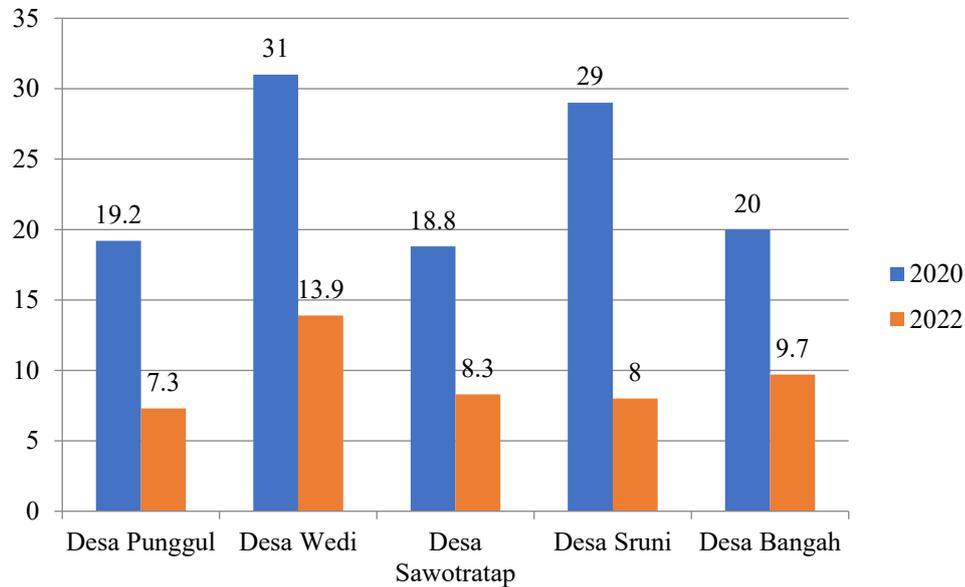
Audit *stunting* sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* memiliki tujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Audit *stunting* mempunyai dua tujuan pokok. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko terjadinya *stunting* pada kelompok sasaran yaitu Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Balita. Selanjutnya memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya

pencegahan yang harus dilakukan. Adapun hal yang menjadi pertimbangan Kecamatan Gedangan khususnya di Desa Sruni dijadikan sebagai lokasi percontohan audit *stunting* sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Fenny Afridawati dikutip oleh Infopublik.id (2022), bahwa berdasarkan hasil bulan timbang tahun 2020 persentase *stunting* di Desa Sruni sebesar 29%, sedangkan hasil bulan timbang tahun 2022 persentase *stunting* sebesar 8%.

Selain itu, juga adanya upaya yang dilakukan untuk penurunan *stunting* di wilayah Kecamatan Gedangan khususnya Desa Sruni ada enam poin sebagai berikut (Infopublik.id, 2022):

1. Hasil pengukuran tinggi badan dan penimbangan oleh kader, divalidasi oleh Petugas Puskesmas dan bidan desa. Didapatkan hasil validasi tidak sesuai, hal ini disebabkan cara perhitungan umur, cara pengukuran dan penimbangan oleh kader serta alat antropometri yang dipergunakan tidak sesuai standar.
2. Menggunakan alat antropometri sesuai dengan standar bekerja sama dengan petugas puskesmas.
3. Penggunaan dana APBDes untuk penanganan *stunting*, yaitu pengadaan alat antropometri, pelaksanaan aktif pos gizi, KP ASI, pembinaan desa siaga aktif, dan pengadaan vitamin bagi balita *stunting*.
4. Penggunaan alokasi alat pengukuran tinggi badan, pemberian makanan tambahan (lokal dan pabrikan), dan obat gizi (vitamin) dari Dinas Kesehatan.
5. Pendampingan kader untuk ibu hamil risiko tinggi dan pendampingan kader untuk balita *stunting* dari Puskesmas (Dana APBN).

6. Menyelenggarakan pelatihan penyegaran kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang oleh Puskesmas (Dana APBD).



Gambar 1.3. Kondisi *Stunting* 5 Desa Prioritas di Kecamatan Gedangan
Sumber: JawaPos.com (2022)

Dua tahun lalu, angka anak *stunting* atau keterlambatan tumbuh kembang di lima desa wilayah Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, masih cukup tinggi. Rata-rata, angkanya mencapai 20 persen. Karena itu, kelima desa masuk dalam kategori desa prioritas penanganan *stunting*. Alhasil, kelima desa prioritas tersebut berhasil menekan angka *stunting* hingga nyaris sepertiga. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati yang dikutip oleh JawaPos.com (2022) sebagai berikut

“Memang perbandingan angka *stunting* dalam dua tahun terakhir memang menurun jauh. Lima desa lokasi khusus (lokus) di Gedangan itu meliputi Sruni, Bangah, Sawotratap, Wedi, dan Punggul. Sruni merupakan desa di Gedangan dengan memiliki persentase besar pada 2020, yakni 29 persen. Tahun ini, angkanya turun hanya tinggal 8 persen. Artinya, tahun ini jumlah anak *stunting* di desa tersebut kurang dari 10 anak. Dan, alhamdulillah trennya menjadi turun memang. Fenny mengapresiasi Posyandu Gedangan yang terus melakukan pengadaan alat antropometri yang layak dan sesuai dengan standar untuk pengukuran tubuh balita. Alat itu bisa mengukur secara detail perkembangan anak, termasuk menghitung

kadar lemak dalam tubuh mereka. Bagusnya lagi, di sana memang ditunjang keaktifan ibu dan kader posyandu yang rutin menimbang dan mengukur tumbuh kembang balita. Walau angka *stunting* sudah turun hingga di bawah 10 persen, Fenny mengaku masih belum bisa tenang. Dinkes Sidoarjo sebenarnya menargetkan seluruh wilayah perlahan bisa menjadi zero *stunting*. Di beberapa desa lain yang bukan prioritas, perlahan persentase anak *stunting* pun menurun. Setidaknya ada delapan desa lainnya yang persentase *stunting*-nya turun menjadi 8 persen ke bawah. Sebaliknya, ada dua desa di Gedangan yang mengalami kenaikan kasus *stunting*.”

(<https://www.jawapos.com/surabaya/02/11/2022/sidoarjo-berhasil-turunkan-angka-stunting-di-lima-desa-prioritas/> diakses pada Kamis, 9 Maret 2023)

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa uraian fenomena kasus *stunting* di Kecamatan Gedangan, penelitian ini akan memfokuskan di Desa Sruni dengan dasar pertimbangan bahwa desa tersebut menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sidoarjo yang berhasil menekan angka *stunting* bahkan hingga 8 persen pada tahun 2022 dari 29 persen di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keaktifan dan kesungguhan kader posyandu yang menjadi salah satu ujung tombak penurunan angka *stunting* di Indonesia (JawaPos.com, 2022).

Menariknya, Kader Posyandu Desa Sruni juga rutin mengedukasikan terkait *stunting* kepada ibu baduta dan balita. Hal ini dikarenakan banyaknya ketidaksadaran masyarakat untuk tidak hadir di pos pelayanan terpadu. Sehingga membuat para kader untuk bisa memberikan edukasi dan konseling kepada ibu balita, baduta, cantin (calon pengantin), bumil (ibu hamil), hingga lansia. Edukasi tersebut dalam rangka penurunan *stunting* di Desa Sruni yang terdiri dari 6 aspek sebagaimana diungkapkan Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes, Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo saat diwawancarai melalui nomor Whatsapp-nya dikutip oleh (MajalahDetekfif.com, 2022) yaitu:

“Yang pertama adalah hasil pengukuran tinggi badan, dan penimbangan oleh kader, divalidasi oleh petugas puskesmas dan bidan desa, yang kedua menggunakan alat antropometri sesuai dengan standar bekerjasama dengan petugas puskesmas, ketiga, penggunaan dana APBDes untuk penanganan stunting, yaitu pengadaan alat antropometri, pelaksanaan aktif pos gizi, MP-ASI, pembinaan desa aktif dan pengadaan vitamin bagi balita stunting. Yang ke empat untuk mendapatkan alokasi alat pengukuran tinggi badan, pemberian PMT (lokal dan pabrikan), dan obat gizi (vitamin), dari DinKes, kelima pendampingan kader ibu hamil resiko tinggi dan pendampingan kader untuk balita stunting dari puskesmas (Dana APBD), dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pelatihan penyegaran kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang oleh Puskesmas”.

(<https://majalahdetektif.com/galeri-seni-cegah-stunting-50-kader-rcce-warugedangan-kabupaten-sidoarjo-edukasikan-terkait-stunting/?amp> diakses pada Kamis, 9 Maret 2023)

Lebih lanjut, dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Kader Posyandu Desa Sruni dalam menarik masyarakat supaya aktif datang ke posyandu, maka diberikan edukasi dan konseling terkait *stunting* diberikan pelatihan seperti kelas memasak, di mana dengan adanya edukasi dan konseling masyarakat bisa sadar dan mereka memiliki pemahaman terhadap pentingnya kesehatan anak. Selain itu, Kader Posyandu Desa Sruni juga mendatangi rumah-rumah warga yang tidak aktif ke posyandu. Dari kunjungan tersebut dapat ketahui penyebab dari rendahnya keaktifan keluarga untuk membawa baduta dan balita ke Posyandu. Setelah mendatangi rumah ke rumah dan memberikan penjelasan akan pentingnya kehadiran ke posyandu, maka angka kunjungan meningkat. Dengan demikian keluarga yang berisiko *stunting* langsung dilakukan pendampingan sehingga balita atau baduta tersebut bisa terlepas dari resiko *stunting*.

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, keberhasilan Desa Sruni menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah mampu mengatasi dan menekan angka *stunting*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Svefors et al.,

(2020) bahwa pada level makro, diperlukan kekuatan kebijakan, strategi, regulasi dan koordinasi antar sektor serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi isu-isu seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan.

Menurut Yayuk Rahmawati selaku Kader Posyandu di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Sidoarjo saat acara Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Balai Desa Sruni, salah satu penyebab keluarga berisiko *stunting* di Desa Sruni bukan karena faktor ekonomi tetapi lebih kepada rendah pengetahuan orang tua akan asupan gizi bagi baduta dan balita mereka. Selain itu, keengganan keluarga untuk hadir ke posyandu sehingga informasi akan pola asuh dan asupan gizi kurang (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2022).

Hal tersebut sejalan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberian makan, perawatan, dan pola asuh yang baik. Menurut Domili et al., (2021), dalam aspek pola asuh pemberian makanan mempengaruhi status gizi balita. Semakin baik pola asuh yang diberikan orang tua semakin baik pula status gizi balita begitupun sebaliknya jika pola asuh kurang baik dalam pemberian makanan maka status gizi balita akan terganggu.

Strategi yang matang dan tepat yang dilakukan pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, masalah *stunting* dianggap sebagai kasus yang perlu ditangani secara khusus mengingat dampaknya tidak hanya pada kesehatan seorang anak tetapi berdampak pada perkembangan kecenderungan produktivitas SDM di suatu daerah (Nirmalasari, 2020) . Dengan demikian, anak-anak yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset penting karena mereka

adalah generasi penerus untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara (Wardita et al., 2021).

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yang membahas tentang strategi pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al., (2022) pada tahun 2022, dalam penelitian yang berjudul “Strategi” Dinas Kesehatan dalam Mendorong Angka Penderita *Stunting* di Kabupaten Buton Selatan”. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa strategi pelayanan kesehatan dalam menekankan angka *stunting* belum berjalan dengan maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak terlalu mementingkan adanya *stunting*. Teori yang digunakan ialah teori strategi pemerintahan dari Robbins (Kusdi, 2009:87). Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, objek kajian terdahulu dengan kajian saat ini, objek kajian terdahulu mengacu pada OPD Dinas Kesehatan, sedangkan kajian ini lebih mengacu pada Pemerintahan Desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan (Mulgan, 2009:19) dikutip oleh Putri & Sukmana (2022).

Urgensi penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Wiyada et al., (2020) bahwa strategi publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak dalam pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan dimana mampu untuk melihat berbagai permasalahan dengan berbagai sudut pandang, sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran pada masyarakat. Dengan demikian, strategi pemerintahan oleh Mulgan (2009:19) dikutip oleh Putri & Sukmana (2022) yang

terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), dan tindakan (*action*) membantu melihat permasalahan secara menyeluruh (*holistic*).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “**Strategi Pemerintahan Desa Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dilandasi oleh latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintahan desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi yang dilakukan pemerintahan desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak agar strategi yang dilakukan pemerintahan desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait *stunting*. Beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk bahan pembandingan bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang serta sebagai acuan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan pihak Universitas dapat memberikan pembelajaran mengenai percepatan penurunan *stunting* kepada mahasiswa, dosen, maupun pegawai.

2. Bagi Intansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sidoarjo sehingga bisa membawa dampak positif bagi masyarakat pada bidang kesehatan.

3. Bagi Mahasiswa

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pentingnya percepatan penurunan *stunting* mengingat kondisi *stunting* di Indonesia yang cukup tinggi. Dengan memahami strategi percepatan penurunan *stunting*, penulis berharap dapat ikut meminimalisir dan menurunkan angka prevalensi *stunting*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang mau melakukan penelitian sejenis. Mahasiswa lainnya juga diharap dapat memahami strategi percepatan penurunan *stunting* melalui penelitian ini.